

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 77 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perangkat daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dan wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan menyusun rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang

- melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
 7. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh tahun).
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 16. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama masa transisi sampai dengan adanya RPJMD hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.
 17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
25. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
26. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
27. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
28. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
29. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
30. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
31. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
33. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

34. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
35. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
37. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
38. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
39. Ketua Tim adalah pejabat fungsional madya, muda, pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan melaporkan capaian kinerja output kegiatan atau sub kegiatan kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Tahun 2025-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas untuk kurun waktu tahun 2025-2026 yang mencakup gambaran Kinerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Pembangunan, Program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Dinas Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Dinas dalam penyusunan Renja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Pembangunan, Program dan Kegiatan

pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam RPD.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas untuk kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Dinas Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas tahun 2025-2026;
- b. Bab II gambaran pelayanan Perangkat Daerah, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas, sumber daya Dinas, kinerja pelayanan Dinas, serta kelompok sasaran layanan Dinas;
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas, berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Dinas berdasarkan tugas dan fungsi Dinas dan Penentuan Isu Strategis.
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas tahun 2025-2026, dan *Cascading* kinerja Dinas.
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.
- f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Pendanaan berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu pendanaan indikatif Dinas tahun 2025-2026.
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan berisi Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Dinas dan penentuan Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2026 melalui IKK dan indikator TPB beserta targetnya; dan
- h. Bab VIII Penutup berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas.

Pasal 5

Renstra Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan Renstra Dinas melalui penyusunan Renja Dinas.

- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Dinas berpedoman atau mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Pembangunan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DINAS

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target tujuan Dinas dan Sasaran Strategis melalui IKU Dinas yang tercantum dalam Renstra Dinas dan Renja Dinas tiap tahunnya.
- (2) Sekretaris Dinas dan kepala bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku pejabat administrasi mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target Hasil Program yang tercantum dalam Renstra Dinas dan IKK serta indikator TPB yang bersifat Hasil.
- (3) Pejabat pengawas dan/atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai Ketua Tim mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas dan IKK yang bersifat Keluaran.
- (4) Evaluasi pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan di input melalui aplikasi sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi kinerja dengan dilampiri atau diunggah bukti pendukungnya.

Pasal 9

Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan atau pejabat fungsional madya untuk ditugaskan sebagai ketua tim kerja yang bertanggung jawab atas capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renstra Dinas.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Perubahan Renstra Dinas dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPD yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan
- e. terjadi perubahan kelembagaan Dinas yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 77 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2025-2026



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2025-2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ini tentunya masih banyak kekurangan, baik substansi maupun narasi yang tertuang, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 ini dapat bermanfaat untuk Kita semua.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Tujuan yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun sebuah dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2026 yang merupakan implementasi dari penjabaran Visi dan Misi pembangunan Bupati Cirebon. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk 2 (dua) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2019-2024 periode sebelumnya. Juga beberapa isu strategis kemasyarakatan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini yaitu :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi antara sekretariat serta bidang- bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon masih belum maksimal;
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Kurang berperannya lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan;
4. Kondisi sosial budaya masyarakat di Desa dan Kelurahan yang masih memprihatinkan;
5. Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan kearifan lokal di Tingkat Desa dan Kelurahan;
6. Lambannya pertumbuhan ekonomi di Desa dan Kelurahan sebagai akibat masih kurang berperannya lembaga-lembaga ekonomi di Desa dan Kelurahan;
7. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan sebanyak 5 program dan 73 Sub kegiatan dengan dukungan dana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	9
2.2 Sumber Daya SKPD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	35
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	42
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII : PENUTUP.....	53



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian	11
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan	11
Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.5 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 2.6 Data Aset Tanah DPMD	13
Tabel 2.7 Data Sarana dan Prasarana DPMD	13
Tabel 2.8 Anggaran selama 5 Tahun.....	13
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Periode 2019-2024	16
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Kunci	33
Tabel 2.11 Pencapaian Indikator SDG's	33
Tabel 3.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal	35
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ...	38
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	40
Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	41
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025-2026	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan daerah selain dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan nasional, juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 1.070,028 Km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 9.407 Rukun Tetangga (RT) dan 2.952 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.100.299 jiwa.

Potensi Kabupaten Cirebon tersebut harus dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan kondisi ini masyarakat Kabupaten Cirebon ditempatkan sebagai subjek yang bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon membangun Kabupaten Cirebon untuk menjadi lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Dengan adanya perubahan perspektif dalam pembangunan, bahwa masyarakat bahkan individu harus berdaya maka metode pemberdayaan masyarakat yang diterapkan harus berjalan dengan baik. Agar dari sisi masyarakat perlu diperkuat nilai untuk berdaya dan tidak selalu tergantung pada pola bantuan. Kemudian metode pemberdayaan terus ditingkatkan dalam bentuk keberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini diawali terlebih dahulu dari pola pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kebutuhan dasar yang diringi dengan proses pemberdayaan dalam perubahan pola pikir masyarakat.

Selama ini banyak anggapan bahwa pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bahkan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan tidak dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, daerah maupun perangkat desa. Sebab pola pembangunan yang bersifat sentralistik sudah ditinggalkan dan sudah menuju kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan baik program pembangunan yang ditangani secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun program yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pemerintahan kecamatan, masyarakat maupun di tingkat desa dan kelurahan, serta peran swasta.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperlukan untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, juga dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dari organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra Perangkat Daerah ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat dalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui dana desa yang tengah menjadi program prioritas pemerintah, desa-desa ini diharapkan terus meningkat menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri berarti desa yang memiliki sumber daya ekonomi sendiri, seperti di sektor pertanian atau sumber ekonomi lainnya sehingga taraf kemiskinan di desa relatif kecil, serta akses pelayanan dasar semakin mudah.

Berdasarkan pada kenyataan ini, maka perlu satu upaya untuk mendorong agar desa-desa dapat lebih berkembang, maju dan mandiri. Jika diidentifikasi permasalahan yang ada di desa, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian : 1) Masalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, 2) Masalah lembaga ekonomi desa/Bumdes, 3) Masalah kapasitas pemerintah desa dan BPD.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon 2025-2026, mengacu dan memperhatikan Isu Strategis Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- Pengangguran dan kemiskinan serta masalah sosial;
- Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- Penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah;
- Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART, yang konsisten dengan Visi, Misi, Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon serta memperhatikan Program Prioritas Kementerian terkait;
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan "sense of

ownership” dari rencana strategis;

- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025-2026 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini yaitu:

- 1) Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka menengah;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D).

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.”

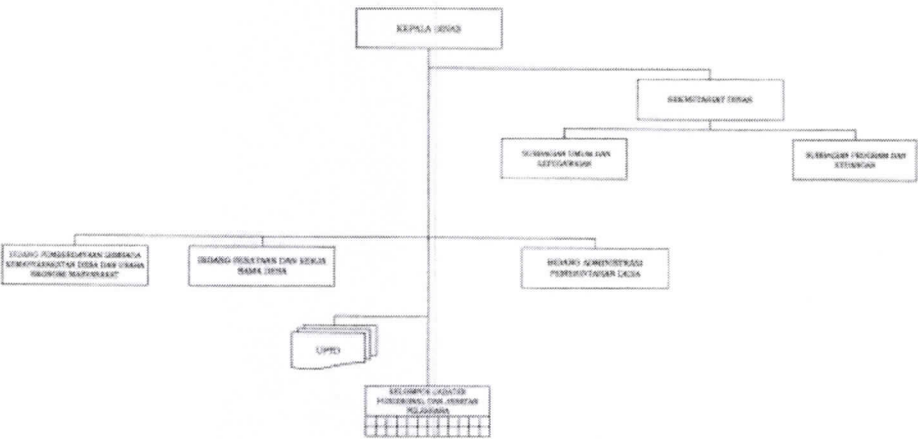
Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. penyelenggaraan penataan desa;
- c. peningkatan kerja sama desa;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

A. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	26	72,22%
2	CPNS	0	0%
3	Honorer/Kontrak Dinas	10	27.78%
		36	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

B. Komposisi Eselon PNS

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Es-I	Es-II	Es-III	Es-IV	JFT	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	2		3	6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat			1	0	6	0	7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa			1	0	5	1	7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa			1	0	2	2	5
	Jumlah		1	4	2	13	6	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	2	3		6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	4			7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	3	4			7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	2	2	1		5
	Jumlah	10	12	4		26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

D. Komposisi Pendidikan PNS

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretariat		1	2	3	6
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat		2	5		7
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		4	3	1	7
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		2	2	1	5
	Jumlah		10	12	5	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

E. Komposisi Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	5	1
3	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	4
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	4	3
5	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	5	
	Jumlah	18	8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

2.2.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Data Aset Tanah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Jenis Barang	Letak/Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Sunan Muria No.20 Sumber	DPMD
2	Tanah Rawa	Jl. Sunan Muria No.xx Sumber	Sekretariat PKK
3	Tanah Tegalan	Jl. Sunan Malik Ibrahim Sumber	Tanah Exs Bengkok

Tabel 2.7 Daftar Sarana Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi).	1
2	Lemari Besi/Metal.	13
3	Lemari Kayu	2
4	Rak Kayu	1
5	Filing Cabinet Besi.	16
6	Lemari Kaca.	4
7	Lemari Makan.	2
8	White Board.	2
9	Alat Penghancur Kertas.	5
10	Mesin Absensi.	2
11	LCD Projector/Infocus.	8
12	Meja Kerja Kayu.	6
13	Kursi Kayu.	8
14	Sice.	4
15	Meja Rapat.	20
16	Meja Podium.	1
17	Meja Resepsionis.	1
18	Meja Bundar.	1
19	Meja 1/2 Biro.	16
20	Kursi Tamu.	1
21	Kursi Putar.	8
22	Bangku Tunggu.	4
23	Meja Komputer.	1
24	Sofa.	1

No	Nama Barang	Jumlah Barang
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.	1
26	Mesin Pemotong Rumput.	1
27	Lemari Es.	2
28	AC Split.	27
29	Exhaust Fan.	1
30	Televisi.	1
31	Sound System.	1
32	Wireless.	1
33	Camera film.	1
34	Tangga Aluminium.	1
35	Dispenser.	2
36	Handy Cam.	1
37	Alat Pemadam/Portable.	5
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	6
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	6
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	1
41	Kursi Rapat Ruangan Rapat	3
42	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II.	1
43	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	6
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis.	2
45	Audio Mixing Portable.	1
46	Telephone Hybrid.	1
47	Microphone/Wireless MIC.	1
48	Professional Sound System.	1
49	Uninterruptible Power Supply (UPS).	4
50	Digital LED Running Text.	1
51	Stabilizing Amplifier.	2
52	Layar Film/Projector.	1
53	Camera Digital.	2
54	Facsimile.	2
55	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	2
56	Mainframe (Komputer Jaringan).	2
57	PC Unit.	27
58	Lap Top.	13
59	Note Book.	1
60	Plotter (Peralatan Mini Komputer).	1
61	Scanner (Peralatan Mini Komputer).	1
62	Monitor.	2
63	Printer (Peralatan Personal Komputer).	26
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	2
65	Modem.	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 s.d 2023 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menerima alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran selama 5 tahun (2019, 2020,2021,2022 dan 2023)

NO	TAHUN	JUMLAH		REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2019	10,242,418,496	9,585,981,240	93,90
2	2020	6,427,945,664	6,005,695,885	93,59
3	2021	14,320,157,282	13,129,630,755	93,43
4	2022	13.927.862.734,00	13.238.869.203,00	95,05
5	2023	17.690.390.500,00	13.881.023.760,00	78,47
TOTAL		62.608.774.676,00	55.841.200.843,00	89,19

Secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat fluktuasi anggaran yang dinamis dari mulai tahun 2019 sebesar Rp. 10.242.418.496,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 17.690.390.500,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon cukup baik dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa periode 2019-2024 (terlampir dalam tabel 2.9), dalam tabel Indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya 2019-2024, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri nomor 73 tahun 2019 (terlampir dalam tabel 2.10).

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Sustainable Development Goals (SDGs) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (terlampir dalam tabel 2.11).



Tabel 2.9.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Meningkatkan status kemajuaan dan kemandirian desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa			Meningkatnya Jumlah desa Mandiri	-	Jumlah Desa Berstatus Desa Mandiri	Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Restra	2	5	28	49	70	91	91
				Indeks Ketahanan Sosial (IKSS)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Index Ketahanan Sosial	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Sosial (IKSS)	0.81	0.81	0.84	0	0	0	0.84
02.			PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga	Daftar hadir peserta musrenbangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	0	0	0	6
				Meningkatnya Jumlah desa yang lembaga Masyarakatnya aktif	Jumlah desa yang lembaga masyarakatnya aktif	Jumlah desa yang lembaga masyarakatnya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir Absensi dalam musrenbangdes dan PERDES RP/Des	40	60	80	0	0	0	140
02.2.01.			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	Jumlah hasil desa yang terfasilitasi untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	Jumlah desa yang lembaga masyarakatnya aktif	Kumulatif		Desa		0	0	10	40	176	196	412
				Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam TMMD dan BSMSS	Jumlah desa yang lembaga masyarakatnya aktif	Kumulatif		Orang		30	55	55	0	0	0	110
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Desa desa yang memperoleh bantuan keuangan provinsi		Kumulatif		Desa		412	412	412	0	0	0	824
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong	Desa yang Masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong		Kumulatif		Desa		92	82	82	0	0	0	164
03.			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrenbangdes dan pembangunan di desa	6	2	2	0	0	0	2
				Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	Diperlukannya Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Kumulatif		Desa		0	0	13	27	88	95	223
03.2.01.			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Meningkatnya jumlah desa yg difasilitasi	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi		Kumulatif		Kawasan		2	2	2	0	0	0	4
				Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama			Kumulatif										



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2020	2021	2022	2023	2024	18	
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	9	10	Daftar hadir peserta musrenbangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	0	0	0	6	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas yang ada pada semua sub kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Orang	Kumulatif				0	0	880	1.798	1.798	1.798	6.274	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
		04.2.01.06.	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	desa desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemufakatan	desa	Kumulatif				0	20	20	0	0	0	40	
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDES RUPDES	40	60	80	0	0	0	140	-Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan di Desa	Jenis	Non Kumulatif				0	0	5	5	5	5	5	peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilatih hingga sub kegiatan kinerja sub kegiatan dipasokan oleh lembaga kemasyarakatan dan keberadaannya keagalahannya
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kader Pemberdayaan masyarakat yang di berikan pelatihan	Orang	Kumulatif				1.296	160	160	0	0	0	320	
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih	orang	Kumulatif				356	400	400	0	0	0	800	
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih	Orang	Kumulatif				186	250	250	0	0	0	500	
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMADK yang di latih	Pengurus LPMADK yang di latih	Orang	Kumulatif				255	590	590	0	0	0	1.180	
				Jumlah pokjani posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri kader posyandu yg dilatih	Posyandu	Kumulatif				391	15	15	0	0	0	30	
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kader PKK yang diberikan pelatihan	Orang	Kumulatif				320	1.860	1.860	0	0	0	3.720	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Type	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa				Indeks Ketahanan Ekonomi (KE)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (KE)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan indeks Ketahanan Ekonomi (KE)	0,78	0,84	0,85	0	0	0	0,85	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor INI untuk mencapai status desa mandiri (0.8480 s.d 0.8836)
04.			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keuangan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP , laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	0	0	0	6	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		04.2.01.	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPJ) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas yang ada pada semua sub kegiatan yang ada di kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kumulatif		Orang		0	0	880	1.798	1.798	1.798	6.274	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah jenis Lembaga Kewasayaaan yang diperoleh dan peningkatan kapasitas	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih		Kumulatif		Desa		160	80	80	0	0	0	160	
05.			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keuangan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP , laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	0	0	0	6	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Desa, Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Lembaga Kewasayaaan yang diperoleh dan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas Lembaga Kewasayaaan di Desa		Non Kumulatif		jenis		0	0	5	5	5	5	5	peningkatan Kapasitas kelembagaan yang diarah hingga mencapai capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilan dan keagaliannya
		05.2.01.05.	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Keluargaibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal		Kumulatif		Keluarga		0	0	25	0	0	0	25	
				Jumlah kelompok SPM/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi di tingkat desa	Kelompok SPM/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi dan pengurusnya		Kumulatif		Kelompok		13	116	116	0	0	0	232	
				Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd		Kumulatif		Rupiah		63	63,5	64,5	0	0	0	128	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD		Total Nilai Persepsi Per Urusur / Total Urusur yang terisi x Nilai Pembobot	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3,55	3,55	3,56	3,57	3,58	3,58	
01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-Jumlah % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	75	75	75	75	75	75	75	Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan dinas	Jumlah disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi	Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	500	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Non Kumulatif	Meningkat	%	Laporan Sektoral	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral
01.2.01.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diperlukannya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun untuk memisahkan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan			Kumulatif		Dok		0	0	1	15	15	15	46	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun sub kegiatan capaian kinerja dan diharapkan
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	0	6	
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	2	2	
		01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	2	2	
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	7	7	
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	1	1	
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang disusun	Data data dokumen profil dinas yang tersusun		Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	0	0	3	
				Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	Data data dokumen Rencana Kerja (RENJA) murni dan Perubahan, Perjanjian Kinerja (PERKIN) murni dan Perubahan		Kumulatif		Dokumen		2	2	2	4	0	0	8	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka lima tahun	Data-data dokumen perencanaan perangkat daerah jangka lima tahunan (Rencana)		Kumulatif		Dok		0	0	1	0	0	0	1
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	5	0	5
	01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	Data-data Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran		Kumulatif		Dok		0	0	0	2	0	0	2
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	2	0	2
	01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	Data-data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMD		Kumulatif		Dok		0	0	0	2	0	0	2
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	2	0	2
	01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Data laporan capaian program dan kegiatan triwulan		Kumulatif		Dokumen		2	4	4	4	0	0	12
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Data data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		Kumulatif		Dokumen		3	3	3	3	0	0	9
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	7	0	7
	01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Data data dokumen Survey Kepuasan Masyarakat		Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	0	0	3
				Jumlah Dokumen SWP yang tersusun	Data-data penunjang penyusunan dokumen SWP		Kumulatif		Dok		0	0	0	1	0	0	1
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Teraksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	1	0	1
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	Operasinya Jumlah Dokumen dan laporan yang dibuat dalam 1 tahun untuk memonitor capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Kumulatif		Dok		0	0	45	45	45	45	180
	01.2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Non Kumulatif		Orang/bulan		0	0	0	0	0	40	40
	01.2.02.0005.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	1	1
	01.2.02.0007.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	18	18



Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Program (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan
					Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	
3. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.2.02.01.		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangan nya setiap bulan			Non Kumulatif		Pegawai		0	27	30	32	0	0	32
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban gaji dan tunjangan		Non Kumulatif		Laporan		0	0	26	26	0	0	52
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Non Kumulatif		Orang/Bulan		0	0	0	0	35	0	35
01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Data data laporan keuangan akhir tahun		Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	0	0	3
			tersusunnya laporan tahunan dinas			Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	0	0	3
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	1	0	1
01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Data data Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		Kumulatif		Dokumen		1	1	18	18	0	0	37
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	18	0	18
01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakalan Dinas yang berakasa	Dipenuhinya Pengadaan Pakalan Dinas guna meningkatkan kesegaran pakaian dinas ASN		Kumulatif		Jenis		0	0	1	1	4	4	10
01.2.05.0002.		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut kelengkapan		Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	4	4
01.2.05.02.		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas	Data Pengadaan Pakalan Dinas		Kumulatif		Sisel		30	30	60	35	0	0	125
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kumulatif		Paket		0	0	0	0	4	0	4
01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kasubahan Penunjang Kantor	Untuk menunjang kelancaran pelayanan dan administrasi perkantoran		Kumulatif		Jenis		0	0	7	7	7	7	28
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadialakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	12	12
01.2.06.0001		Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadialakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadialakan		Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	10	10
01.2.06.0002		Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadialakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadialakan		Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	10	10



Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan		
					Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	2	2	
	01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	11	11	
	01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	12	12	
	01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	12	12	
	01.2.06.0008.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	12	12	
	01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	130	130	
	01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Data jenis komponen listrik yang disediakan			Non Kumulatif		Jenis		1	3	3	4	0	0	4	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Data Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia			Kumulatif		Jenis		7	11	8	10	0	0	29	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	10	0	10	
	01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Data Makanan dan Minuman yang di sediakan			Kumulatif		Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	0	0	6.710	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	2	0	2	
	01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Data barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Non Kumulatif		Jenis		21	21	21	21	0	0	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	11	0	11	
	01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Data Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia			Kumulatif		Exmpliar		2.640	1.920	3.020	3.050	0	0	7.990	
			Jumlah Dokumen Bahan Boacan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Data jenis Alat Tulis Kantor yang di beli			Non Kumulatif		Jenis		47	47	47	47	0	0	47	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan/Material yang di sediakan			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan	Data Makanan dan Minuman yang di sediakan			Kumulatif		Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	0	0	6.710	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD	Data laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD			Kumulatif		Laporan		1	101	105	110	0	0	316	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	120	0	120	



Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan		
					Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Kumulatif		Unit		0	0	1	1	1	1	4	Dalam melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah, setiap capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilannya dan kegagalannya
	01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	1	1	
	01.2.07.02.		Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	Data data pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	Data data pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)		Kumulatif		Unit		0	0	0	1	0	0	1	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kumulatif		Unit		0	0	0	0	1	0	1	
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah jenis jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	Jumlah jenis jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Non Kumulatif		jenis		0	0	6	6	6	6	6	Dalam melakukan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, setiap capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilannya dan kegagalannya
	01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	12	12	
	01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	12	12	
	01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Data data Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Data data Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)		Non Kumulatif		Rekening		3	3	3	3	0	0	3	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	-	-		Non Kumulatif		jenis		0	0	3	3	0	0	3	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	12	0	12	
	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Kumulatif		Tahun		0	0	1	1	1	1	4	Tercapainya jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara, setiap capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilannya dan kegagalannya
	01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Non Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	14	14	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kumulatif	Unit			0	0	0	0	0	6	6	
		01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Teraksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kumulatif	Unit			0	0	0	0	0	4	4	
		01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Non Kumulatif	Unit			0	0	0	0	0	4	4	
		01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Data Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)		Non Kumulatif	Unit			25	25	14	14	0	0	14	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Non Kumulatif	Unit			0	0	0	0	14	0	14	
		01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	Data data jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya		Kumulatif	Unit			21	21	21	21	0	0	63	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kumulatif	Unit			0	0	0	0	6	0	6	
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Data data peralatan gedung kantor yang dipelihara		Non Kumulatif	Jenis			3	4	4	4	0	0	4	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Teraksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kumulatif	Unit			0	0	0	0	4	0	4	
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Data data gedung kantor yang terpelihara		Non Kumulatif	unit			3	3	3	3	0	0	3	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Non Kumulatif	Unit			0	0	0	0	4	0	4	
Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun				Nilai Status Indeks Desa Membangun	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri		Non Kumulatif	Poin			0	0	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75	Rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status Indeks Desa Mandiri
	02.		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		Kumulatif	Meningkat			0	0	2,42	9,7	42,73	45,15	100	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya
	02.2.61	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	Jumlah hasil desa yang terfasilitasi untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan			Kumulatif	Desa			0	0	10	40	176	186	412	hasil dalam capaiannya, setiap capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilan dan kegunaannya
	02.2.01.0002	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Teraksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa		Kumulatif	Desa			0	0	0	0	0	10	10	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.0003.	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	0	186	186	
		02.2.01.0006.	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarapa dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa		Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	412	412	
		02.2.01.01.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pemekaran Desa	Pemekaran Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.02.	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	1	0	1	
		02.2.01.03.	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayahnya		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.04.	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi prasarana perdesanya (Desa Lokasi Pemnimas)	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	10	40	0	0	50	
		02.2.01.06.	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	176	0	176	
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang mendapat Perdes APBDesnya Tepat Waktu	Desa desa yang penataan Perdes APBDesnya tepat waktu		Kumulatif		Unit		0	0	0	0	412	0	412	
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	Desa desa yang penataan Perdes APBDesnya tepat waktu		Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Perdes RKPDes yang ditetapkan pada bulan September dan Perdes APBDDes yang ditetapkan pada akhir Desaember	6,06	0	12,13	24,2	30,33	36,43	36,43	Desa-desa yang tepat waktu Penetapan Perdes RKPDes dan APBDDesnya
		04.2.01.0001.	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas yang ada pada semua sub kegiatan yang ada di kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kumulatif		Orang		0	0	880	1.798	1.798	1.798	6.274	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
		04.2.01.0002.	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	412	412	
		04.2.01.0003.	Facilitasi Penyusunan Pembinaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Pembinaan Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Pembinaan Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	40	40	
		04.2.01.0004.	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	5	5	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan			Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan		
						Rumus	Tipe	Target			Satuan	2020	2021	2022	2023		2024	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Non Kumulatif		Orang		0	0	0	0	0	6.072	6.072	
		04.2.01.0006.	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	20	20	
		04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	160	160	
		04.2.01.0010.	Facilitasi Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	100	100	
		04.2.01.0011.	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang disusun	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	412	412	
		04.2.01.0013.	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	100	100	
		04.2.01.0014.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Kumulatif		Orang		0	0	0	0	0	100	100	
		04.2.01.0015.	Facilitasi Peningkatan dan Penguasaan BUM Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Peningkatan dan Penguasaan BUM Desa	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan dan Penguasaan BUM Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	0	0	40	40	
		04.2.01.0016.	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	100	100	
		04.2.01.0018.	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	40	40	
		04.2.01.01.	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Rakor untuk aparat dan fasilitator kecamatan		Kumulatif		Rakor		0	0	1	4	0	0	5	
				Jumlah desa yang di Money dan diupdate status IDNMye	Desa desa yang di Money tentang penyelenggaraan pemerintahan		Non Kumulatif		Desa		0	0	0	412	0	0	412	
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Sistem informasi tentang perencanaan, keuangan, laporan dan evaluasi, serta data aparat		Kumulatif		sistem		0	0	7	8	0	0	15	
				Jumlah Peraturan Bupati yang di susun terkait dengan administrasi Pemerintahan Desa	Peraturan yang disusun untuk menjadikan Desa tertib administrasi		Kumulatif		Perbup		0	0	0	2	0	0	2	
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Desa desa yang di evaluasi tata kelola pemerintahannya		Kumulatif		Desa/Kecamatan		0	0	40	40	0	0	80	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	412	0	412	
		04.2.01.02.	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum dasarnya	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	40	0	0	40	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	40	0	40	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPMDes	penataan dokumen perencanaan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	135	0	0	135	
				Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RPMDes	Penataan Dokumen Perencanaan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	40	0	0	40	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Teraksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	80	0	80	
		04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Desa desa yang di Monvri tentang pengelolaan keuangan desa		Non Kumulatif		Desa		0	0	73	150	0	0	150	
				Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa			Kumulatif		Dok		0	0	1	5	0	0	6	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Teraksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	5	0	5	
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Aparatur desa dan penyelenggara pemerintah desa yang di tingkatkan kapasitasnya		Kumulatif		Orang		0	0	0	1.148	0	0	1.148	
				Jumlah BPJS Kuru dan Perangkat Desa yang dibayar			Non Kumulatif		Orang		0	0	5.048	5.048	0	0	5.048	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Teraksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Non Kumulatif		Orang		0	0	0	0	6.072	0	6.072	
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan	desa desa yang di fasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan		Kumulatif		Desa		0	0	20	20	0	0	40	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Teraksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	20	0	20	
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih		Kumulatif		Desa		0	0	43	43	0	0	86	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Teraksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	86	0	86	
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuru	Desa desa yang belum memiliki kuru definitif		Kumulatif		Desa		0	0	135	0	0	0	135	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Teraksanakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	100	0	100	
		04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya	Terb. Administrasi NRPD Perangkat Desa		Kumulatif		Orang		0	0	0	100	0	0	100	
				Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Teraksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	0	0	
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Data data desa yang di inputkan ke sistem		Non Kumulatif		Desa		0	0	80	125	0	0	125	



Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan		
					Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah Dokumen Profil Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kumulatif				Dokumen		0	0	0	0	125	0	125	
	04.2.01.13.	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa-desi yang di Monerv tentang Pengelolaan Aset Desa	Non Kumulatif				Desa		0	0	0	150	0	0	150	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kumulatif				Dokumen		0	0	0	0	150	0	150	
	04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kumulatif				Orang		0	0	0	100	0	0	100	
			Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kumulatif				Orang		0	0	0	0	100	0	100	
	04.2.01.15.	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desainya	Tertib dan jelasnya Batas Desa	Kumulatif				Desa		0	0	0	40	0	0	40	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kumulatif				Desa		0	0	0	0	40	0	40	
	04.2.01.16.	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	Pelaporan yang baik dan tepat waktu	Kumulatif				Desa		0	0	0	100	0	0	100	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kumulatif				Laporan		0	0	0	0	100	0	100	
	04.2.01.18.	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Penilaian Desa dan Kelurahan	Kumulatif				Desa		0	0	0	40	0	0	40	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kumulatif				Dokumen		0	0	0	0	40	0	40	
05.		PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	(Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif : Jumlah Desa se-Kabupaten Cirebon) x 100 %		Meningkat	Prosen	Daftar Sasaran Desa Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	0	0	20,39	21,36	21,84	23,79	87,38	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Desa	Non Kumulatif				Jenis		0	0	5	5	5	5	5	peningkatan Kapasitas kelembagaan yang dilatih hingga mencapai capaian kinerja sub kegiatan ini akan diketahui dalam keberhasilan dan kegagalannya
05.2.01.0003.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kumulatif				Lembaga		0	0	0	0	0	100	100	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kendisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	05.2.01.0005.		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	3	3	
	05.2.01.0006.		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	3	3	
	05.2.01.0007.		Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	2	2	
	05.2.01.0009.		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	7	7	
	05.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di berikan pelatihan		Kumulatif		Orang		0	0	100	850	0	0	950	
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih		Kumulatif		Orang		0	0	0	400	0	0	400	
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih		Kumulatif		Orang		0	0	0	250	0	0	250	
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMDK yang di latih	Pengurus LPMDK yang di latih		Kumulatif		Orang		0	0	0	590	0	0	590	
				Jumlah pokjani posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri		Kumulatif		Posyandu		0	0	0	15	0	0	15	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kumulatif		Lembaga		0	0	0	0	100	0	100	
	05.2.01.05.		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang dibudayakan ekonominya secara informal	Keluarga/ibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal		Kumulatif		Keluarga		0	0	25	25	0	0	50	
				Jumlah kelompok SPPIUEP yang di tingkatan kapasitasnya	Kelompok SPPIUEP yang di tingkatan kapasitas organisasi dan penguatannya		Kumulatif		Kelompok		0	0	116	116	0	0	232	
				Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang diestartkan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd		Kumulatif		Rupiah		0	0	65.000.000.000	65.000.000.000	0	0	130.000.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	3	0	3	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		05.2.01.06.	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Inovasi inovasi yang telah teruji dan dapat di manfaatkan untuk kemajuan ekonomi desa		Kumulatif		Inovasi		0	0	0	2	0	0	2	
				Jumlah Posyamek Kecamatan yang dibina	Posyamek yang ada di Kecamatan semakin Maju		Kumulatif		Posyamek		0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	3	0	3	
		05.2.01.07.	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen Laporan Rekap keg. BBGRM	Desa-desa pelaksanaan BBGRM		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	40	0	0	40	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	2	0	2	
		05.2.01.09.	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggerak PKK Di Bina	Peningkatan Kapasitas Kader PKK		Kumulatif		Desa		0	0	40	40	0	0	80	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	7	0	7	
				Meningkatnya jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa	Kemampuan Kemandirian Desa dalam Membayar APBDes tidak tergantung Dana Transfer	(Jumlah Desa yang Mengunggulkan Pendapatan Asli Desa di APBDes - $\frac{1}{2}$ Jumlah Desa Se Kabupaten Cirebon) X 100 %	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	0	0	20	40	55	70	70	Prosentase rata-rata nilai kenaikan Jumlah Desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa
	03.		PROGRAM Peningkatan KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa : Jumlah Desa se Kabupaten Cirebon 1 x 100 %	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dokumen Kerjasama Desa baik berupa Perjanjian Bersama atau Peraturan Bersama Kewu tentang Kerjasama antar desa	0	0	3.15	8.3	31.06	54.12	54.12	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa baik antar Desa maupun dengan pihak ketiga
	03.2.01.		Facilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	Diperlukannya Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya untuk memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan		Kumulatif		Desa		0	0	13	27	88	95	223	hasil desa yang difasilitasi setiap capaian kinerja sub kegiatan dipastikan diketahui alasan keberhasilan dan kegagalannya
	03.2.01.0001.		Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	95	95	
	03.2.01.0002		Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	8	8	
	03.2.01.0003.		Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	1	1	
	03.2.01.01.		Facilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi		Kumulatif		Kawasan		0	0	0	2	0	0	2	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya			Kumulatif		Desa		0	0	13	27	0	0	40	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	88	0	88	
	03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Peningkatan Kesejahteraan Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	2	0	0	2	
				Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)		Kumulatif		Jenis		0	0	7	7	0	0	14	
				Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)		Kumulatif		Jenis		0	0	6	7	0	0	13	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	5	0	5	
	03.2.01.03.	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerataan Kesejahteraan antar Desa		Kumulatif		Desa		0	0	0	2	0	0	2	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	



Tabel 2.10
 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Pemberdayaan Masyarakat	Persente Peningkatan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang pertahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n	Persen	83.33	100	100	100	0
		Persente Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)	Persen	5.46	37.07	1.02	1,08	1,50

Tabel 2.11
 Pencapaian Indikator SDGs
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Tujuan /Target/ Indikator	Satuan	Realisasi Tahunan						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Desa	39	44	12	2	0	0	0
2	Jumlah desa tertinggal	Desa	39	44	12	2	0	0	0
3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	7	42	79	128



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, Peran dan fungsi Kelembagaan yang ada di Masyarakat belum optimal dalam penyelenggaraan pembangunan Desa;
2. Masalah lembaga ekonomi desa/Bumdes, Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Cirebon belum mencapai kepada perekonomian yang kuat sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap Bumdes/Bumdesma yang ada di Kabupaten Cirebon;
3. Masalah Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya dirasakan oleh Masyarakat, Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan belum secara optimal dalam pembinaan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam 2 (dua) tahun mendatang, yakni 2025-2026 diharapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa untuk maju dan bertransformasi dari UPK menjadi Bumdesma;
2. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
3. Adanya kemauan yang keras bagi Aparatur Pemerintahan Desa untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Adanya upaya terstruktur dan sistematis bagi Aparatur Kecamatan dalam membina Aparatur Desa terkait penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Upaya yang ditempuh agar tercapainya tugas dan fungsi tersebut yaitu melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2025-2026 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.1

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan/ancaman (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1	Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	1	Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan
2	Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai	2	Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem
3	Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal
4	Komitmen aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal	4	Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai
Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman/Tantangan (Threats)
1	Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa	1	Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa
2	Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya	2	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama

3	Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	3	Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa
4	Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kerjasama desa baik antar desa maupun dengan pihak lain	4	Tingkat Kerjasama Antar Desa dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan bisa membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum terjaln dengan optimal
5	Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	5	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, sehingga visi, misi, program, dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun isu-isu yang berhasil diidentifikasi pada urusan pemerintahan secara umum khususnya untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

- 1) Belum optimalnya penguatan lembaga kemasyarakatan desa;
- 2) Belum optimalnya Penguatan kelembagaan ekonomi desa (Bumdes) yang aktif dan produktif berbasis sumberdaya/potensi unggulan desa;
- 3) Belum optimalnya penguatan pemerintah desa dan BPD

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dalam upaya menuju tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 yang dijabarkan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.41
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-	
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun		Indeks Desa Membangun (IDM)	0.79 Poin	0.79	0.80
		Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	10 Persen	15 Persen	25 Persen
		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.70 Poin	3.71 Poin	3.72 Poin

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis menggunakan metode analisis *SWOT* yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga, berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut penentuan, pengambilan, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya strategi dan arah kebijakan yang sangat mendukung dalam proses pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sangat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Visi				
Misi IV				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun	Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa dlm penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) DAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)	Mengsinergikan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)
			Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa	meningkatkan ekonomi desa melalui pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa
			Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa.
			Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, dalam penyusunan dan penetapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan LKPJ kepala desa	Mensinergikan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, dalam penyusunan dan penetapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan LKPJ kepala desa
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun keterkaitan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat dilihat pda tabel berikut.

Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaan PD (IKU)	Program
	Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	Program penataan desa
					Program peningkatan kerjasama desa
					Program administrasi pemerintahan desa
					Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Tabel 6.1 pada halaman berikutnya.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Penataan Perangkat Daerah Rinde 2024-2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025		2026				Kondisi Akhir	
							K	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun				Kinerja: Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun. Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM)	0,78 Persen	0,79	0,79	28.510.000.000	0,8	31.025.000.000	0,8	59.535.000.000		
	Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa			Kinerja: Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Tolok Ukur: Persentase Desa yang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah terverifikasi	0 Persen	5	15	28.510.000.000	25	31.025.000.000	25	59.535.000.000		
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Desa yang di Fasilitas Penataan Kewenangan Desa nya. Tolok Ukur: Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitas Peraturan Desa tentang Penataan Kewenangan Desa	65 Persen	75	80	610.000.000	90	800.000.000	90	1.410.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kinerja: Terselenggaranya Penataan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	59 Dok	70	46	610.000.000	40	800.000.000	86	1.410.000.000		
		02.2.01.0001.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	0	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0002.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	0	10	50.000.000	20	75.000.000	30	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0003.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	65 Desa	75	80	150.000.000	90	200.000.000	170	350.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0004.	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 Desa	0	5	50.000.000	5	75.000.000	10	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0005.	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	5	50.000.000	5	75.000.000	10	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0006.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kinerja: Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa. Tolok Ukur: jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0 Unit	412	412	260.000.000	412	300.000.000	412	560.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025		2026				Kondisi Akhir	
							K	K	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03.		03.2.01.	PROGRAM PEMINGKATAN KENJASAMA DESA	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa. Tolok Ukur: Peningkatan % jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	12 Persen	24	30	1.550.000.000	40	1.775.000.000	70	3.325.000.000		
				Kinerja: Terselenggaranya Fasilitas Kerja sama antar Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Dok	95	61	1.550.000.000	61	1.775.000.000	122	3.325.000.000		
				Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12	30	250.000.000	40	350.000.000	70	600.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Kinerja: Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	2	1.250.000.000	2	1.350.000.000	2	2.600.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
03.2.01.0003.		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	2	2	50.000.000	2	75.000.000	2	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
			Kinerja: Meningkatnya Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya. Tolok Ukur: Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya	22.42 Persen	36,43	45	16.250.000.000	50	17.300.000.000	50	33.550.000.000			
04.			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
04.2.01.		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kinerja: Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	40 Dok	412	412	16.250.000.000	412	17.300.000.000	412	33.550.000.000		
				Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	412	412	250.000.000	412	300.000.000	412	550.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
04.2.01.0002.		04.2.01.0002.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	80	120	200.000.000	160	250.000.000	160	450.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
04.2.01.0004.		04.2.01.0004.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	5	5	350.000.000	5	400.000.000	5	750.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2023		2024		2025			2026			Kondisi Akhir			
					K	K	K	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Tolok Ukur: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9.004 Orang	1.124	1.236	11.000.000.000	1.236	12.000.000.000	1.236	23.000.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0006.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	20	20	150.000.000	20	200.000.000	40	350.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0007.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kinerja: Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	0	10	50.000.000	20	50.000.000	30	100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	160	160	1.500.000.000	160	1.600.000.000	320	3.100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0009.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kinerja: Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Laporan	100	177	750.000.000	0	0	177	750.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0010.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	100	0	177	150.000.000	177	150.000.000	177	150.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)			
		04.2.01.0011.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	125 Dokumen	412	412	250.000.000	412	350.000.000	412	600.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0012.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	2	5	400.000.000	10	450.000.000	15	850.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	412	412	150.000.000	412	200.000.000	412	350.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0014.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD. Tolok Ukur: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	100	200	400.000.000	212	450.000.000	412	850.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		04.2.01.0015.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0 Desa	40	40	100.000.000	74	100.000.000	114	200.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023		2024		2025			2026					Kondisi Akhir	
					K	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		05.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	3	3	350.000.000	3	400.000.000	6	750.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0006.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	3	3	225.000.000	3	250.000.000	6	475.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0007.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	2	2	850.000.000	2	1.000.000.000	4	1.850.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0008.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0	5	75.000.000	10	100.000.000	15	175.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0009.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	7	7	850.000.000	7	900.000.000	14	1.750.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0010.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kinerja: Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat. Tolok Ukur: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		05.2.01.0011.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	Kinerja: Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling Tolok Ukur: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	0 Keluarga	0	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan					57,84 Persen	0	68,5	10.555.000.000	68,5	11.085.000.000	68,5	21.640.000.000						
					Kinerja: Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Cirebon. Tolok Ukur: Nilai SAKIP Kab. Cirebon													



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					K	K	K	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Kinerja: Meningkatkan nilai LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tolok Ukur: Nilai LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Persen	73.3	73.4	10.555.000.000	73.5	11.085.000.000	73.5	21.640.000.000				
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja: Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tolok Ukur: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.57 Persen	89.5	92.6	10.555.000.000	92.8	11.085.000.000	92.8	21.640.000.000				
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Tolok Ukur: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	15 Dok	15	15	290.000.000	15	360.000.000	30	650.000.000				
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6	4	125.000.000	4	150.000.000	8	275.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kinerja: Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7	7	65.000.000	7	75.000.000	14	140.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	2	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya Jumlah Dokumen dan laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun. Tolok Ukur: Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	18 Dok	19	19	6.590.000.000	19	6.610.000.000	38	13.200.000.000				
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta P3K. Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN serta P3K	26 Orang/bulan	40	45	6.500.000.000	50	6.500.000.000	50	13.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	40.000.000	1	50.000.000	2	90.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir				
							K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18	18	50.000.000	18	60.000.000	36	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah. Tolok Ukur: Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana	0 Dok	0	2	35.000.000	2	35.000.000	4	70.000.000			
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kinerja: Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	12	15.000.000	12	15.000.000	24	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya pelaksanaan administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah. Tolok Ukur: Jumlah jenis pelaksanaan administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah	0 Dok	1	3	140.000.000	3	175.000.000	6	315.000.000			
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. Tolok Ukur: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1	2	60.000.000	2	70.000.000	4	130.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kinerja: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Tolok Ukur: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	40	50.000.000	40	70.000.000	80	120.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	40	30.000.000	40	35.000.000	80	65.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja: tersedianya jumlah jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor. Tolok Ukur: jumlah jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor	7 Jenis	7	10	945.000.000	10	1.105.000.000	20	2.050.000.000			
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Tolok Ukur: jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kantor.	12 Paket	12	12	20.000.000	12	25.000.000	24	45.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Tolok Ukur: jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir				
							K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga. Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	12	20.000.000	12	25.000.000	24	45.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja: Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	2	35.000.000	2	40.000.000	4	75.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kinerja: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11	11	65.000.000	11	70.000.000	22	135.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	12	35.000.000	12	40.000.000	24	75.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kinerja: Tersedianya Bahan/Material, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	12	350.000.000	12	400.000.000	24	750.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12	45.000.000	12	50.000.000	24	95.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	130	130	200.000.000	135	225.000.000	265	425.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Dalam Daerah dan Luar Daerah	
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	12	25.000.000	12	30.000.000	24	55.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Tolok Ukur: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	0 Unit	0	5	1.700.000.000	3	1.825.000.000	8	3.525.000.000			
		01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Tolok Ukur: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	4	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (- Kecamatan sumber)	
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Kinerja: Tersedianya Mebel, Tolok Ukur: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1	300.000.000	1	350.000.000	2	650.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					K	K	K	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Tolok Ukur: jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	650.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD Kab Cirebon	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: jumlah jenis jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	2 jenis	2	4	550.000.000	4	600.000.000	8	1.150.000.000			
		01.2.08.0001.	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kinerja: Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat, Tolok Ukur: jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	12	15.000.000	12	15.000.000	24	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD		
		01.2.08.0002.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja: Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tolok Ukur: jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	250.000.000	12	275.000.000	24	525.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.08.0003.	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tolok Ukur: jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	60.000.000	12	60.000.000	24	120.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.08.0004.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kinerja: Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor, Tolok Ukur: jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	12	225.000.000	12	250.000.000	24	475.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Tolok Ukur: jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	0 Jenis	0	5	305.000.000	5	375.000.000	10	680.000.000			
		01.2.09.0002.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Tolok Ukur: jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6 Unit	1	2	50.000.000	2	60.000.000	2	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, Tolok Ukur: jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Tolok Ukur: jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Tolok Ukur: jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	450.000.000	SEKRETARIAT DPMD	dpmd (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
TOTAL PENDANAAN								39.065.000.000		42.110.000.000		81.175.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 terutama Target dan Sasaran Daerah Pemerintah Kabupaten seperti tersebut dalam Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	Persen	10	15	25	25
2.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	3.70	3.71	3.72	3.72

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2026 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam dokumen masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan diketahui pula oleh stakeholder.

LAMPIRAN-LAMPIRAN RENSTRA



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2024-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025		2026				Kondisi Akhir	
							K	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun				Kinerja: Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM)	0,78 Persen	0,79	0,79	28.510.000.000	0,8	31.025.000.000	0,8	59.535.000.000		
	Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa			Kinerja: Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, Tolok Ukur: Persentase Desa yang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah terverifikasi	0 Persen	5	15	28.510.000.000	25	31.025.000.000	25	59.535.000.000		
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Kinerja: Meningkatkan Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa nya, Tolok Ukur: Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitasi Peraturan Desa tentang Penataan Kewenangan Desa	65 Persen	75	80	610.000.000	90	800.000.000	90	1.410.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kinerja: Terselenggaranya Penataan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	59 Dok	70	46	610.000.000	40	800.000.000	86	1.410.000.000		
		02.2.01.0001.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	0	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0002.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	0	10	50.000.000	20	75.000.000	30	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0003.	Penataan Kewenangan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	65 Desa	75	80	150.000.000	90	200.000.000	170	350.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0004.	Penamaan dan Kode Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 Desa	0	5	50.000.000	5	75.000.000	10	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0005.	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	5	50.000.000	5	75.000.000	10	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0006.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kinerja: Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa, Tolok Ukur: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0 Unit	412	412	260.000.000	412	300.000.000	412	560.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
							K	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03.		PROGRAM/PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kinerja: Meningkatkan Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, Tolok Ukur: Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	12 Persen	24	30	1.550.000.000	40	1.775.000.000	70	3.325.000.000		
	03.2.01.		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kinerja: Terselenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Dok	95	61	1.550.000.000	61	1.775.000.000	122	3.325.000.000		
	03.2.01.0001.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12	30	250.000.000	40	350.000.000	70	600.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	03.2.01.0002.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kinerja: Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	2	1.250.000.000	2	1.350.000.000	2	2.600.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	03.2.01.0003.		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	2	2	50.000.000	2	75.000.000	2	125.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	04.		PROGRAM/ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya, Tolok Ukur: Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya	22,42 Persen	36,43	45	16.250.000.000	50	17.300.000.000	50	33.550.000.000		
	04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kinerja: Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	40 Dok	412	412	16.250.000.000	412	17.300.000.000	412	33.550.000.000		
	04.2.01.0001.		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	412	412	250.000.000	412	300.000.000	412	550.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	04.2.01.0002.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	04.2.01.0003.		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	80	120	200.000.000	160	250.000.000	160	450.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	04.2.01.0004.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	5	5	350.000.000	5	400.000.000	5	750.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025			2026					Kondisi Akhir	
							K	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Tolok Ukur: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9.004 Orang	1.124	1.236	11.000.000.000	1.236	12.000.000.000	1.236	23.000.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0006.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	20	20	150.000.000	20	200.000.000	40	350.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0007.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kinerja: Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	0	10	50.000.000	20	50.000.000	30	100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	160	160	1.500.000.000	160	1.600.000.000	320	3.100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0009.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kinerja: Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Laporan	100	177	750.000.000	0	0	177	750.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0010.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	100	0	0	177	150.000.000	177	150.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0011.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	125 Dokumen	412	412	250.000.000	412	350.000.000	412	600.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0012.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	2	5	400.000.000	10	450.000.000	15	850.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	412	412	150.000.000	412	200.000.000	412	350.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0014.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kinerja: Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Tolok Ukur: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	100	200	400.000.000	212	450.000.000	412	850.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		04.2.01.0015.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tolok Ukur: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0 Desa	40	40	100.000.000	74	100.000.000	114	200.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
							K	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		04.2.01.0016.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Laporan	100	200	200.000.000	200	250.000.000	200	450.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		04.2.01.0017.	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kinerja: Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	0 Dokumen	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	100.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		04.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	0	40	400.000.000	45	450.000.000	45	850.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kinerja: Meningkatkan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif, Tolok Ukur: Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	14,6 Persen	23,79	24	10.100.000.000	26	11.150.000.000	50	21.250.000.000		
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Tolok Ukur: Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Jenis	5	5	10.100.000.000	5	11.150.000.000	5	21.250.000.000		
		05.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kinerja: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Lembaga	100	100	6.700.000.000	200	7.300.000.000	300	14.000.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		05.2.01.0004.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Tolok Ukur: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0	424	750.000.000	424	800.000.000	848	1.550.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	K	Rp	Rp	K	K	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		05.2.01.0005.	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	3	3	350.000.000	3	400.000.000	6	750.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0006.	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	3	3	225.000.000	3	250.000.000	6	475.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0007.	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	2	2	850.000.000	2	1.000.000.000	4	1.850.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0008.	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0	5	75.000.000	10	100.000.000	15	175.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0009.	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	7	7	850.000.000	7	900.000.000	14	1.750.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0010.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kinerja: Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, Tolok Ukur: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		05.2.01.0011.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kinerja: Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Tolok Ukur: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan					67,84 Persen	0	68,5	10.555.000.000	68,5	11.085.000.000	68,5	21.640.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025			2026					Kondisi Akhir	
							K	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Kinerja: Meningkatnya nilai LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tolok Ukur: Nilai LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Persen	73,3	73,4	10.555.000.000	73,5	11.085.000.000	73,5	21.640.000.000				
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja: Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,57 Persen	89,5	92,6	10.555.000.000	92,8	11.085.000.000	92,8	21.640.000.000				
	01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Tolok Ukur: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	15 Dok	15	15	290.000.000	15	360.000.000	30	650.000.000				
	01.2.01.0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6	4	125.000.000	4	150.000.000	8	275.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	01.2.01.0002.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kinerja: Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	01.2.01.0006.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7	7	65.000.000	7	75.000.000	14	140.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	01.2.01.0007.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	2	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya jumlah Dokumen dan laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	18 Dok	19	19	6.590.000.000	19	6.610.000.000	38	13.200.000.000				
	01.2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta P3K, Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN serta P3K	26 Orang/bulan	40	45	6.500.000.000	50	6.500.000.000	50	13.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	01.2.02.0005.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	40.000.000	1	50.000.000	2	90.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023	2024	2025			2026					Kondisi Akhir	
							K	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18	18	50.000.000	18	60.000.000	36	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana	0 Dok	0	2	35.000.000	2	35.000.000	4	70.000.000				
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kinerja: Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Tolok Ukur: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	12	15.000.000	12	15.000.000	24	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Jenis pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah	0 Dok	1	3	140.000.000	3	175.000.000	6	315.000.000				
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1	2	60.000.000	2	70.000.000	4	130.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kinerja: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tolok Ukur: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	40	50.000.000	40	70.000.000	80	120.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	40	30.000.000	40	35.000.000	80	65.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja: tersedianya jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor	7 Jenis	7	10	945.000.000	10	1.105.000.000	20	2.050.000.000				
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	12	20.000.000	12	25.000.000	24	45.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10	5	150.000.000	5	200.000.000	10	350.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	12	20.000.000	12	25.000.000	24	45.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja: Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	2	35.000.000	2	40.000.000	4	75.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kinerja: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11	11	65.000.000	11	70.000.000	22	135.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	12	35.000.000	12	40.000.000	24	75.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kinerja: Tersedianya Bahan/Material, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	12	350.000.000	12	400.000.000	24	750.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja: Terlaksananya Facilitasi Kunjungan Tamu, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12	45.000.000	12	50.000.000	24	95.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	130	130	200.000.000	135	225.000.000	265	425.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Dalam Daerah dan Luar Daerah		
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	12	25.000.000	12	30.000.000	24	55.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, Tolok Ukur: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran memastikan capaian kinerja sub kegiatan sesuai dengan yang diharapkan	0 Unit	0	5	1.700.000.000	3	1.825.000.000	8	3.525.000.000				
		01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Tolok Ukur: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	4	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (- Kecamatan sumber)		
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Kinerja: Tersedianya Mebel, Tolok Ukur: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	2	50.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1	300.000.000	1	350.000.000	2	650.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	650.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD Kab Cirebon		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	2 Jenis	2	4	550.000.000	4	600.000.000	8	1.150.000.000				
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja: Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	12	15.000.000	12	15.000.000	24	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD			
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	250.000.000	12	275.000.000	24	525.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	60.000.000	12	60.000.000	24	120.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kinerja: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	12	225.000.000	12	250.000.000	24	475.000.000	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	0 Jenis	0	5	305.000.000	5	375.000.000	10	680.000.000				
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1	2	50.000.000	2	60.000.000	2	110.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, Tolok Ukur: Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	SEKRETARIAT DPMD	DPMD (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	450.000.000	SEKRETARIAT DPMD	dpmd (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
TOTAL PENDANAAN					39.065.000.000				42.110.000.000				81.175.000.000			

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					6	7	9	10	11	12	13	14		15

Sumber, Maret 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

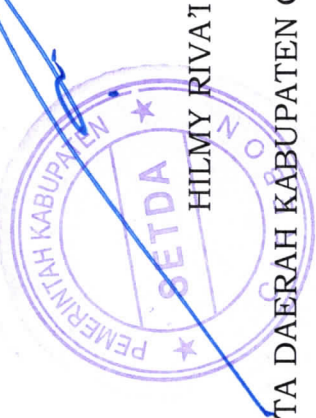
NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19800703 199810 1 001

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 77